

ABSTRAK

Ragam sengketa tanah yang timbul di masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam permasalahan masyarakat, yang salah satunya adalah sengketa sertifikat tanah ganda. Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui aspek hukum perbuatan melawan hukum yang timbul dalam sengketa sertifikat ganda dan kewajiban Tergugat dalam perbuatan melawan hukum atas penguasaan hak tanah yang sertifikatnya dibatalkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis doktrinal yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembahasan dipaparkan melalui spesifikasi analisis deskriptif. Penulis melakukan pengumpulan data melalui data kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sebagai jenis dan sumber data. Kesimpulan atas penelitian ini diuraikan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat tanah ganda mengakibatkan ketidakpastian hak di mana terdapat tumpang tindih hak dan terhadap segala penguasaan di atas tanah tersebut oleh pihak selain penggugat dianggap tidak sah dan berdasar hukum sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan perbuatan melawan hukum menimbulkan beban kewajiban untuk pembuat melakukan ganti kerugian atas kesalahannya.

Kata kunci: Penguasaan tanah, Sertipikat tanah ganda, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The variety of land disputes that arise in today's society cannot be separated from various kinds of community problems, one of which is the dispute over multiple land certificates. This research was conducted with the aim of knowing the legal aspects of unlawful acts that arise in disputes over multiple certificates and the obligations of the Defendant in tort over the possession of land rights whose certificates were cancelled.

This research uses normative juridical and doctrinal juridical approaches, namely approaches to laws and court decisions. The discussion is presented through descriptive analysis specifications. The author collects data through library data using secondary data as the type and source of data. The conclusion of this research is described inductively.

The results of this study indicate that the issuance of multiple land certificates results in uncertainty of rights where there are overlapping rights and all control over the land by parties other than the plaintiff is considered illegal and based on the law so that it is seen as a tort as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Actions against the law creates a burden of obligation for the maker to make compensation for his mistakes.

Keywords: *Land tenure, Multiple land certificates, Tort*